

MOTIVASI RUSIA MERATIFIKASI PARIS AGREEMENT PADA TAHUN 2019

Author : Marsaulina Siahaan

(email : marsaulina.siahaan2879@student.unri.ac.id)

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP. M.Si

Bibliografi : 12 Buku, 30 Jurnal, dan 34 Website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau, 28293

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

the Paris Agreement is an agreement that focuses on enhancing the global response to climate change. Russia as one of the countries that ratified the agreement. This study aims to determine Russia's motivation in ratifying the Paris Agreement in 2019.

This research implies qualitative method with explanative research type. In analyzing this phenomenon, this research implies the Foreign Policy Theory by Graham T. Allison in the perspective of Realism, state is the level analysis in this researched. To analyze this research, the authors collect documents and information from books, journals, websites and various official websites.

Based on the analysis carried out, it is shows that Russia's policy motivation in ratifying the Paris Agreement is influenced by several things, in accordance with this research hypothesis that Russia's ratification of the Paris Agreement is to prove that the Russia is an essential actor in international politics, took action against the Paris agreement as an opportunity to improve its international image.

Keywords : Rusia, Foreign Policy Theory, Paris Agreement, essential actor

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup (*Enviromental issues*), dewasa ini telah menjadi inti permasalahan yang memperoleh perhatian khusus dunia internasional. Hal ini berkaitan dengan masalah perubahan iklim yang merupakan dampak dari pemanasan global (*global warming*) yang disebabkan oleh kegiatan manusia dalam menggunakan sistem energi berbahan baku fosil pada aktivitas industri dan upaya pengalihan fungsi lahan. Penipisan lapisan ozon yang menimbulkan efek rumah kaca (GRK) terjadi dikarenakan meningkatnya konsentrasi gas buang seperti (CO₂, CH₄N₂O, HFCs, PFCs, SF₆) sehingga menyebabkan peningkatan suhu global.

Berdasarkan Laporan *assessment reports* 6 (AR6) tahun 2021

mengungkapkan bahwa saat ini, permukaan bumi sudah memanas 1,1 derajat Celcius melebihi level pre-industrial, dan jika tidak ada tindakan yang transformasional, cepat, dan berskala besar, maka dalam 20 tahun mendatang temperatur global diperkirakan akan mencapai atau bahkan melebihi 1,5°C.¹ Hal ini dapat menyebabkan gelombang panas akan lebih sering terjadi, musim kemarau menjadi lebih lama dan musim dingin lebih singkat dan berdampak buruk untuk kehidupan manusia dimana melibatkan dunia secara keseluruhan dan tidak terikat batas wilayah suatu negara.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memitigasi dampak pemanasan

¹ AR6 Climate Change. The physical science basis 2021
<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wgl/> dikunjungi 14 september 2021

global dan perubahan iklim, termasuk kerjasama bilateral dan kesepakatan internasional. Kompleksitas berbagai masalah yang disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global pertama kali dibahas pada tahun 1992 pada Earth Summit di Rio de Janeiro, Brasil. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim lahir dari konferensinya (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) yang bertujuan untuk menjaga konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman bagi s Pada sidang ketiga Konferensi Para Pihak (COP-3) di Kyoto, Jepang, pada tahun 1997, dicapai kesepakatan berupa keputusan untuk mengadopsi Protokol Kyoto untuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terdiri dari Implementasi Bersama (*Joint Implementation*), Perdagangan Emisi (*Emission Trading*), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*) dengan periode komitmen, merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi gabungan emisi gas rumah kaca mereka setidaknya 5% dari tingkat emisi tahun 1990. Protokol Kyoto mulai berlaku untuk pertama kalinya pada tahun 2008.

Selama perkembangannya, Protokol Kyoto tidak berhasil memenuhi target penurunan emisi dunia dikarenakan minimnya komitmen negara-negara industri (Annex I) dalam menurunkan emisinya. istem iklim. Kemudian pada desember 2015, pihak Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFCCC) melaksanakan *Conference of Parties* (COP) ke-21 yang diadakan di Paris. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang pengurangan emisi gas rumah kaca di bumi serta implementasi apa saja yang dinilai efektif dalam menangani permasalahan lingkungan global yang kemudian berhasil mengadopsi sebuah perjanjian iklim yang disebut *Paris Agreement*. *Paris Agreement* tidak hanya membahas tentang perubahan iklim dan upaya penurunan emisi gas

rumah kaca dan penurunan suhu bumi dibawah 2°C, tetapi juga membahas tentang aturan, prosedur, dan mekanisme pembangunan suatu negara. Negara yang terlibat dalam *Paris Agreement* berpartisipasi secara sukarela kemudian melakukan pembangunan yang nyata dan bersifat jangka panjang terkait dengan mitigasi perubahan iklim, dan yang terakhir adalah adanya verifikasi dan sertifikasi tentang pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca.

Secara garis besar ada lima poin penting dalam *Paris Agreement* yang diantaranya limit *Temperature Rise Well Below 2°C* (Menahan suhu dibawah 2°C), *First Universal Climate Agreement* (Perjanjian Iklim Universal Pertama), *Helping Poorer Nation* (Membantu Negara Miskin), *Publishing Greenhouse Gas Reducion Targets* (Mencapai Target Penurunan Gas Rumah Kaca) dan *Carbon Neutral by 2050* (Karbon Netral Pada Tahun 2025). Pemberlakuan *Paris Agreement* akan dianggap efektif apabila berlaku *entry into force* dimana ada sekitar 55 negara yang menyampaikan instrumen ratifikasi dan sekiranya mampu mempresentasikan 55% dari total emisi GRK (Gas Rumah Kaca) global kepada pihak Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa. Setiap negara juga harus melakukan upaya-upaya yang ambisisus untuk mengatasi dampak merugikan dari perubahan iklim. Selain itu, negara maju merupakan *lead state* dalam pencapaian target penurunan emisi sedangkan negara berkembang terus berupaya meningkatkan mitigasi di negara mereka. Perjanjian ini secara hukum diberlakukan dengan resmi pasca tahun 2020 dan telah diratifikasi oleh 195 negara di dunia.

Rusia merupakan salah satu negara yang mendatangani dan meratifikasi *Paris Agreement*, meskipun Rusia sendiri merupakan salah satu negara produsen energi fosil sekaligus polutan Green House Gas (GHG) terbesar di dunia sehingga komitmennya dalam *Paris Agreement* dapat berkontribusi besar terhadap

keberhasilan dari rezim internasional tersebut untuk mengatasi diskursus perubahan iklim. Hal ini dibuktikan berdasarkan data *World Resource Institute* (WRI) 2020, Rusia masuk dalam Negara terbesar penyumbang GRK di dunia.² Rusia pada awalnya secara teknis tidak akan meratifikasi *Paris Agreement* karena nuansa hukum, namun akan menerapkan *Paris Agreement* untuk memerangi perubahan iklim dan hal ini telah disetujui oleh perdana menteri Dmitry Medvedev. Medvedev mengatakan Rusia akan menyesuaikan kesepakatan itu dengan aturan yang ada dan mengatakan Rusia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan jika ingin mengubah ekonominya menjadi ekonomi rendah karbon.

Dalam konteks ini, Rusia mendeklarasikan penerimaannya atas *Paris Agreement* dimana Rusia tercantum sebagai pihak pada konvensi (*The Convention*) pada September 2019, menyadari pentingnya menjaga iklim dan memastikan pembangunan berkelanjutan, berencana untuk terus membantu negara-negara berkembang dalam mencapai tujuan *Paris Agreement*, termasuk mengurangi dampak antropogenik terhadap iklim dan beradaptasi dengan konsekuensi perubahannya. Rusia mengumumkan target untuk membatasi emisi gas rumah kaca, yang memberikan pengurangan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 hingga 70% dibandingkan dengan tingkat tahun 1990, sebagai bagian dari pelaksanaan *Paris Agreement*, dengan mempertimbangkan kemungkinan kapasitas penyerapan maksimum dari hutan dan ekosistem lainnya dan tunduk pada keberlanjutan dan pembangunan sosial ekonomi yang seimbang dari Rusia.

² Johannes Friedrich, Mengpin Ge and Andrew Pickens, *World Resources Institute :This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters 10 Desember 2020* diakses dalam <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>

KERANGKA TEORI

Perspektif Realisme

Realisme adalah salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional yang mengkaji fenomena yang terjadi. Dimana realisme merupakan suatu perspektif yang muncul sebagai penentang pandangan Liberalisme.³ Apabila Liberalisme memandang bahwa hubungan antar negara dapat bersifat kooperatif, Realisme berpikiran sebaliknya dan cenderung meragukan adanya kerja sama antar negara yang efektif. Terdapat empat asumsi dasar dalam perspektif realisme menurut Jackson dan Sorensen. Asumsi pertama adalah pandangan pesimistis kaum realis terhadap sifat alami manusia. Asumsi kedua adalah Keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang. Asumsi ketiga adalah Menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Asumsi yang terakhir adalah Skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik.

Aktor utama dalam hubungan internasional adalah negara, karena kaum realis tidak meyakini adanya kedaulatan yang lebih tinggi dari negara. Kaum Realis memandang fenomena sistem internasional sebagai sesuatu yang anarki. Karena itu, negara cenderung menjalin interaksi dan membentuk aliansi untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Sama seperti hal nya negara Rusia dalam mengambil langkah yang lebih serius dalam ratifikasinya terhadap *paris agreement*.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan sudut pandang hubungan internasional melalui model aktor rasional oleh Graham Allison yang dapat memberi gambaran mengenai keputusan yang

³ Jackson, Robert & Sorensen. *Introduction to International Relations*, Oxford. 1999 Chap 3, pp. 67-106.

diambil Rusia dalam *Paris Agreement* termasuk dalam kebijakan luar negeri jika dilihat dari model aktor rasional. Mengenai teori kebijakan luar negeri fokus kepada aktor yang terjadi antara bangsa dan lintas negara nya yang didasarkan pada pembuatan keputusan negara yang bertindak secara individu maupun kelompok.⁴ Karya Graham Allison dalam *Essence of Decision* berdampak sangat besar dalam studi dan pengajaran birokrasi dan pembuatan kebijakan luar negeri. Karya ini menjelaskan bahwa pendekatan teoritis secara sadar untuk mempelajari birokrasi dan kebijakan luar negeri.⁵ Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya Allison juga memberikan tiga model dalam keputusan kebijakan luar negerinya. Model tersebut adalah aktor rasional, proses organisasi, dan Politik Domestik. Allison menunjukkan bagaimana dia menjelaskan secara eksplisit mengenai sebuah peristiwa yang tersirat dalam banyak hal.⁶ Allison memetakan beberapa *organizing concept* atau variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis keputusan yang diambil oleh suatu negara.²⁸

Pertama ada *national actor*, mengingat model ini melihat negara sebagai pihak uniter (satu kesatuan) yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara rasional sehingga pemerintahan yang sedang berkuasa menjadi aktor utama dalam unit analisisnya. Kemudian, ada *the problem* atau permasalahan yang dihadapi sebuah negara hingga mendorong respon dalam bentuk keputusan luar negeri. Permasalahan pun terbagi menjadi permasalahan yang datang dari pihak luar, hingga permasalahan domestik yang sedang dihadapi oleh negara. Ketiga, ada

static selection adalah aktivitas pemerintahan yang dianggap masih relevan dengan upaya penyelesaian permasalahan utama. Aktivitas ini dapat berupa pernyataan- pernyataan dari para pejabat yang memegang kendali utama, yang merepresentasikan posisi negara dalam menghadapi masalah.⁷

Terakhir, ada *action as rational choice* atau rancangan kebijakan yang sudah melewati beberapa indikator pertimbangan dari beberapa variabel rinci dan dipilih menjadi solusi oleh negara.²⁹ Pertama ada *goals and objectives* atau tujuan utama serta persepsi negara terhadap masalah yang dihadapi, lalu ada *options* atau alternatif kebijakan lain yang dapat dipilih oleh negara, *consequences* sebagai resiko yang dihadapi negara apa bila memilih kebijakan tersebut, terakhir ada *choice* atau keputusan yang paling memungkinkan untuk dipilih dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir konsekuensi. Allison juga memasang standar untuk mengasumsikan mana kebijakan yang paling memaksimalkan keuntungan bagi negara, yakni relevansi pada tujuan utama negara, anggapan mengenai kebijakan alternatif, perkiraan mengenai rangkaian konsekuensi di samping beberapa alternatif kebijakan, serta penilaian negara dari setiap rangkaian konsekuensi.

PEMBAHASAN

Bergabungnya Rusia dalam *Paris Agreement* dan keputusan Rusia meratifikasi perjanjian tersebut, maka Rusia memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota yang akan melakukan koordinasi mengenai kebijakan dalam hal perubahan iklim dan penanggulangan lingkungan. Perdebatan tentang Hubungan Internasional sebagai disiplin akademis baru terjalin dalam dua pemikiran utama yang salah satunya adalah kita sebut dengan Realisme, dengan

⁴ Hudson, V. *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*. *Foreign Policy Analysis*. 2005. Hal. 1-30.

⁵ Graham T. Allison. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company. 1971.

⁶ Bendor, J., & Hammond, H. T. *Rethinking Allison's Model*. *American Political Science Review*. 1992 hal.1-24.

⁷ Graham T. Allison. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company. 1971. hlm 33

sentralitas negara yang proyeksi kekuasaan negara untuk kepentingan negara dan yang lainnya biasa disebut dengan Idealisme yang menyarankan landasan yang lebih luas dalam kerja sama internasional dalam organisasi dan diplomasi multilateral. Negara dan Kekuasaan sebagai salah satu alasan kepentingan negara dalam kebijakan luar negerinya. Graham Allison, dalam studinya pada tahun 1971, *Essence of Decision*, berpendapat bahwa mungkin tidak ada rasionalitas garis lurus tunggal yang ditentukan.⁸

A. Keputusan Rusia Meratifikasi *Paris Agreement*

Keputusan Rusia tidak bergabung pada periode kedua Protokol Kyoto, serta tidak meratifikasi *Paris Agreement* pada awalnya hingga akhirnya Rusia kemudian mengubah keputusannya dan meratifikasi perjanjian tersebut. dikarenakan antara Protokol Kyoto dan *Paris Agreement* memiliki perbedaan signifikan yang terletak pada sifat *Paris Agreement* lebih fleksibel terkait penentuan target emisi. Ratifikasi sendiri baru dilakukan setelah terjadinya berbagai bencana alam serta temuan mengenai dampak perubahan iklim tersebut, tepatnya pada 21 September 2019. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa keputusan Rusia untuk pada akhirnya meratifikasi *Paris Agreement* dipengaruhi oleh budaya strategis Rusia. Dalam hal ini elemen budaya strategis yang paling berpengaruh berdasarkan serangkaian peristiwa dan temuan penelitian serta pernyataan Presiden Putin adalah identitas *The Great Russia*.

Tujuan dari keputusan ratifikasi ini seperti dalam kasus Protokol Kyoto sebagian besar ditentukan oleh paradigma aktivitas Kebijakan Luar Negeri Rusia. Menjadi penting bagi Rusia untuk berpartisipasi dan menjadi peserta penuh dalam diskusi dan keputusan mengenai

politik iklim internasional selanjutnya. Namun, dalam kasus *Paris Agreement* akan sangat penting bagi negara untuk membawa perubahan signifikan dalam kebijakan domestik yang sebenarnya hal tersebut belum siap untuk Rusia. Pertanyaan atas keputusan ratifikasi Rusia terhadap *Paris Agreement* yang muncul atas dasar apabila penerapan *Paris Agreement* terjadi akan mengancam keamanan ekonomi dan tidak menguntungkan Rusia serta mengurangi produksi bahan bakar fosil. Terlebih lagi potensi langkah-langkah untuk mengurangi emisi GRK begitu besar sehingga berpotensi mengalami kerugian besar. Dalam suatu situasi dengan tujuan yang masuk akal, kuat dan ambisius, kerangka dari *Paris Agreement* memungkinkan untuk menjadi alat yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Target iklim Rusia untuk tahun 2030, yang saat ini sedang dibahas dengan para konvensi diajukan dan diajukan ke Sekretariat UNFCCC pada tahun 2015 sebagai pendahuluan NDC sebelum KTT Iklim Paris. Bunyinya sebagai berikut: “*Tujuan jangka panjang untuk membatasi emisi gas rumah kaca antropogenik di Rusia dapat mencapai 70-75 persen dari emisi tahun 1990 pada tahun 2030 [yaitu . dikurangi 25-30%.* Dengan mempertimbangkan kemungkinan daya serap hutan semaksimal mungkin. Pada saat yang sama, pengurangan aktual yang tercatat dalam emisi gas rumah kaca di Rusia, dengan mempertimbangkan penyerapan di sektor pertanian, pada 2018, sudah 48,3% dari tingkat 1990.⁹Jadi, bahkan dengan mengambil batas atas NDC awal sebagai tujuan (minus 30%) menyiratkan peningkatan aktual emisi gas rumah kaca dari 36% dari tingkat saat ini. Proyeksi emisi yang tersedia tidak mencapai tingkat ini bahkan tanpa adanya tindakan apa pun (peningkatan efisiensi

⁸ Chen, S. Theories of Foreign Policy and International Relations. *E-International Relations*. 2017. Hal 1-6.

⁹ Laporan Inventaris Nasional, 2019, [https:// unfccc.int /documents/ 194838](https://unfccc.int/documents/194838); draft Laporan Inventarisasi Nasional, 2020

energi, konversi BAT, dll). Penerapan tujuan -30% pada tahun 2030 dari tingkat 1990, oleh karena itu, akan berarti pencemaran partisipasi Rusia pada *Paris Agreement* dan tidak akan memungkinkan realisasi potensi langkah-langkah di atas untuk mengurangi emisi dan memastikan pembangunan berkelanjutan negara selama setidaknya sepuluh tahun.¹⁰

B. Kebijakan Rusia Meratifikasi Perjanjian Paris

Sebagai negara penghasil emisi gas terbesar di dunia, Rusia melakukan upaya-upayanya untuk memitigasi emisi gas karbon di negaranya. Dengan bergabung di *Paris Agreement* dan meratifikasinya, Rusia sudah memperlihatkan keseriusan dan ambisinya untuk mengatasi emisi gas karbon. Sebagai negara yang mengambil keputusan untuk bergabung dengan kerja sama internasional, Rusia melakukan beberapa alternatif dalam mencapai tujuan negaranya dengan melakukan beberapa upaya untuk memaksimalkan potensi dan memanfaatkan inovasi teknologi demi menanggapi kepentingannya. Alternatif dari kerja sama ini sebagai motivasi Rusia untuk bisa mencapai kepentingannya dengan mengumumkan target untuk membatasi emisi gas rumah kaca dengan pengurangan hingga 70% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990, dengan mempertimbangkan kemungkinan kapasitas penyerapan maksimum dari hutan dan ekosistem lainnya. Dalam hal ini Rusia melakukan berbagai upaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya termasuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Strategi Dekarbonisasi Rusia dan UE dan Transisi Kebijakan Rusia ke Ekonomi Hidrogen.

1. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Rusia

Rusia adalah salah satu negara yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Mekanisme pendukung energi terbarukan beroperasi dengan berbagai tingkat efisiensi, yang berbeda di pasar listrik dan kapasitas eceran dan grosir. Sumber dukungan keuangan untuk RES (Renewable Energy Sources) dapat berupa dana anggaran atau dana dari pasar grosir listrik dan kapasitas, sehingga ada dua pendekatan untuk mekanisme pengembangan industri. Pendekatan pertama adalah bahwa energi terbarukan yang didukung negara harus dibiayai dari sumber utama dukungan negara anggaran Rusia. Pendekatan kedua adalah bahwa RES, sebagai industri energi, harus didukung melalui mekanisme khusus yang dibangun di pasar listrik yang sedang berkembang, yaitu melalui pasar listrik grosir.

Untuk mencapai tujuan *Paris Agreement* (yaitu, membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga 2°C di atas tingkat pra-industri dan mengejar komitmen untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C) perubahan besar harus diperkenalkan pada pasar bahan bakar fosil. Sebagian besar ekonom percaya bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2040-an. Manfaat pengurangan emisi gas rumah kaca dari penetapan harga karbon jauh lebih besar daripada biayanya sehingga menjadikannya kekuatan pendorong transisi energi. Bisnis, sebagai kekuatan pendorong masyarakat, harus menyatakan dukungan mereka terhadap kebijakan yang sehat yang melindungi kemampuan bisnis untuk menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan. Salah satu langkah terpenting ke arah yang benar adalah pengenalan harga karbon internal sendiri untuk membantu masyarakat memerangi perubahan iklim.

¹⁰ Romanovskaya AA, Korotkov VN, Polumieva PD, Trunov AA, Vertyankina V.Yu., Karaban RT. Greenhouse gas fluxes and mitigation potential for managed lands in the Russian Federation. 2019

2. Transisi Kebijakan Rusia ke Ekonomi Hidrogen

Minat dalam industri hidrogen telah meningkat secara global. Inisiatif 'hijau' Eropa telah mewajibkan pemasok gas alam untuk mempertimbangkan untuk meningkatkan keramahan lingkungan dari bahan baku. Menyadari pentingnya industri hidrogen, Rusia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Federasi Rusia No. 2162-p untuk mengintegrasikan dan melengkapi kebijakan terkait hidrogen yang tersebar. Selain itu, pemerintah Rusia mempresentasikan strategi jangka panjang untuk pengembangan ekonomi hidrogen pada tahun 2050. Rusia menetapkan strategi nasional jangka panjang untuk kebijakan energi yang memiliki dampak kritis terhadap perekonomian negara dalam satuan lima tahun. Kebijakan energi yang terakhir ditetapkan menunjukkan arah kebijakan energi Rusia dari tahun 2020 hingga 2035. Arah kebijakan utama dalam laporan Strategi Energi 2035 Rusia dapat diringkas menjadi tiga strategi. Strategi pertama adalah memanfaatkan sumber energi utama Rusia saat ini, seperti minyak mentah, gas alam, batu bara, dan tenaga nuklir. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan negara untuk terus memusatkan kebijakan pengembangan energi pada minyak mentah dan gas untuk mempertahankan posisinya yang kuat di pasar energi global. Strategi kedua adalah mempromosikan ekspansi ekspor ke pasar Asia daripada pasar Barat yang ada, sekaligus memperkuat posisi Rusia di pasar energi global.

Agar Rusia dapat mempertahankan posisinya yang kuat saat ini di pasar energi global, kebijakan pengembangan energinya harus terus dipertahankan di sekitar minyak mentah dan gas. Oleh karena itu, kebijakan promosi energi hijau atau energi terbarukan melengkapi pengembangan sumber energi tradisional tersebut. Sulit untuk mempertimbangkan kebijakan terkait energi hijau sebagai kebijakan utama Rusia. Strategi energi jangka

menengah dalam Strategi Energi 2035 masih fokus pada pengembangan sumber daya tradisional, dan strategi pengembangan energi hijau Rusia, seperti tenaga surya dan angin, tetap tidak signifikan.

3. Strategi Dekarbonisasi Rusia dan Uni Eropa

Strategi dekarbonisasi perusahaan, mekanisme regulasi karbon perbatasan, serta mengidentifikasi bidang yang menjadi minat dan potensi bersama kerjasama antara UE dan Rusia dalam memerangi perubahan iklim. Bergabungnya Rusia dengan *Paris Agreement* tahun 2019 kemudian pada tanggal 4 November 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani Dekrit "Tentang Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca" dengan tujuan mengurangi emisi pada tahun 2030 hingga 70% dari tingkat tahun 1990. Beberapa peristiwa "iklim" penting direncanakan dalam waktu dekat di negara ini, termasuk pengembangan "Strategi Pengembangan Rendah Karbon Rusia hingga 2050" dan penerapan kerangka kerja legislatif untuk emisi gas rumah kaca. Uni Eropa, telah berkomitmen untuk sepenuhnya menghapus bahan bakar fosil pada tahun 2050 dan telah memulai diskusi tentang target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030. Seperti yang dicatat oleh Duta Besar Uni Eropa untuk Rusia, kenyataannya sangat penting bagi semua pemain internasional untuk bertukar pengalaman dan pandangan tentang ancaman iklim global. Konferensi Iklim Rusia-Eropa adalah acara besar pertama yang diselenggarakan oleh UE di luar perbatasannya dengan topik perubahan iklim. Menurut duta besar, dia adalah simbol pentingnya Uni Eropa untuk Rusia sebagai mitra dalam memerangi perubahan iklim.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan teori kebijakan luar negeri Graham Allison yang berfokus pada model aktor rasional, motivasi Rusia meratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2019 sebagai salah satu kesempatan untuk meningkatkan citra positifnya dan membuktikan bahwa negara tersebut merupakan aktor penting dalam politik iklim internasional. Keunggulan *Paris Agreement* dibanding perjanjian sebelumnya yakni Protokol Kyoto membuat Rusia sedikit lebih yakin menyerahkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca hingga 70% hingga pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990 pada saat ratifikasinya 2019. Dimana pandangan pemerintah Rusia terhadap isu lingkungan hidup masih menganggap bahwa aktivitas manusia bukan satu-satunya pendorong pemanasan siklus iklim.

Rusia telah muncul sebagai pemain utama dalam politik iklim internasional karena perannya yang menentukan dalam perjanjian seperti protokol kyoto, posisinya sebagai pemasok global utama bahan bakar fosil dan andil Rusia yang signifikan dalam emisi global. Sejak naiknya putin menjabat kembali peran globalnya dan membuat Rusia “terlihat” di lingkungan internasional. Rusia mencoba menyelesaikan masalah negosiasi iklim dengan memperkenalkan dirinya sebagai kekuatan ekologis yang hebat. Namun, keuntungan relatif sangat penting untuk negara Rusia dan kepemimpinannya selalu dalam mode siaga memantau pendekatan negara-negara besar seperti AS dan China dan selalu berhati-hati dalam membuat komitmen dalam negosiasi iklim. Hal ini dibuktikan ketika Rusia tidak berpartisipasi dalam periode kedua Protokol Kyoto serta keterlambatannya dalam meratifikasi *Paris Agreement*.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Bendor, J & Hammond, H. T. *Rethinking Allison's Model*. American Political Science Review. 1992.

Creswell, J. W. “*Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*”. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar. 2010.

Allison, Graham T. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company. 1971.

Hudson, V. *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*. Foreign Policy Analysis. 2005.

Jackson, Robert & Sorensen. *Introduction to International Relations*, Oxford. 1999.

Kafle, T. R. *Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis*. Journal University of Nicosia. 2011.

Mas’oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Metode*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Antar Universitas Studi Sosial.1998.

Mas’oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. 1990.

Patrick, M. *Theories and Approaches to International Politics: What are We Think?* New Brunswick Transactio. 1982 dikutip di Mochtar Masoed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. 1990.

Keohane, Robert O. *International Institutions: Two Approaches*. Harvard University: International Studies Quarterly. 1998.

Sardiman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Steans, Jill & Lloyd Pettiford. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*. (Terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

JURNAL

- Adnan Vatansever and Anna Korppoo, A *Climate Change Vision for Russia : From Rhetoric to Action*, Carneige Endowment, 1 August 2012 diakses pada 18 Mei 2022 <https://carnegieendowment.org/2012/08/01/climate-vision-for-russia-from-rhetoric-to-action>
- Andonova L, Mansfield ED, Milner HV. *International trade and environmental policy in the postcommunist world*. Comp. Polit. Stud. 2007. <https://doi.org/10.1177/0010414006293215>
- Avdeeva, T. G. *Russia and the kyoto Protocol: Challenges ahead*. Review of European Community & International Environmental Law. 2005. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2005.00449.x>
- Boudon, R. *Limitations of Rational Choice Theory*. American Journal of Sociology. 1988. Hal 817-828. <https://doi.org/10.1086/210087>
- Buhner, B, & Dall'Olio, S. *Russia and the Kyoto Protocol: The long road to ratification*. Transition Studies Review 2005 <https://doi.org/10.1007/s11300-005-0066-8>
- Charlotte Streck, et. Al. "The Paris Agreement: A New Beginning", Journal For European Environmental & Planning Law 13, 3-29 2016, hal 9-10 <https://doi.org/10.1163/18760104-01301002>
- DeBardeleben J, Heuckroth K. *Public attitudes and ecological modernization in Russia*. In *The Struggle for Russian Environmental Policy*, ed. I Massa, V Tynkkynen. Helsinki: Kikimora. 2001.
- Dmitrieva, Anastasia. *GLOBAL GAS: Russia Bets on Hydrogen Future as Pressure for Cleaner Fuel Mounts*. 2021 <https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/091721-global-gas-russia-bets-on-hydrogen-future-as-pressure-for-cleaner-fuel-mounts>.
- Funke O. *Russian environmental security issues: competing frameworks for the future*. Int. J. Environ. Technol. Manag. 2005
- Gusev, A. "Evolution Of Russian Climate Policy: From The Kyoto Protocol To The Paris Agreement", *L'Europe en Formation* 2016.p. 39-52. <https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2016-2-page-39>
- Henry LA, Sundstrom LM. *Russia and the Kyoto Protocol: seeking an alignment of interests and image*. Glob. Environ. Polit. 2007 <https://orcid.org/0000-0001-7112-7568>
- Hønnelund G, Jørgenson A. *Implementing international environmental agreements in Russia: lessons from fisheries management, nuclear safety and air pollution control*. Glob. Environ. Politic. 2003. <https://ideas.repec.org/a/tpr/glenvp/v3y2003i1p72-98.html>
- Kevin A. Baumert dan Nancy Kete, "Introduction: An Architecture for Climate Protection," in *Building on the Kyoto Protocol: Options for Protecting the Climate*, ed. J. Baumert, K., Blanchard, O., Llosa, S. and Perkaus (Washington DC: World Resources Institute), 33, http://pdf.wri.org/opc_full.pdf

- Korppoo A, Karas J, Grubb M, eds. *Russia and the Kyoto Protocol: Opportunities and Challenges*. London: Chatham House. 2006. <https://www.semanticscholar.org/paper/Russia-and-the-Kyoto-protocol-%3AopportunitiesandKorppooKaras/d4196035f7c29cc38b3f0496ec0e13a0db2e7742>
- Korppoo, A., & Moe, A. *Russian climate politics: Light at the end of the tunnel?* Climate Strategies Briefing Paper. 2007. https://www.researchgate.net/publication/239533204_russian_climate_politics_light_at_the_end_of_the_tunnel
- Kotov, V. *Policy in Transition: New Framework for Russia's Climate Policy*. Fondazione Eni Enrico Mattei. Nota Di Lavoro No. 58 2002. <https://www.feem.it/en/publications/policy-in-transition-new-framework-for-russias-climate-policy/>
- Kotov V., Nikitina, E. *Reorganization of Environmental Policy in Russia: The Decade of Success and Failures in Implementation and Perspective Quests*. Fondazione Eni Enrico Mattei. Nota Di Lavoro 57.2002. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/119667/1/NDL2002-057.pdf>
- Oldfield JD, Kouzmina A, Shaw DJB. *Russia's involvement in the international environmental process: a research report*. Eurasian Geogr. Eco .2003. <https://doi.org/10.2747/1538-7216.44.2.157>
- Paltsev, S. V. *The Kyoto Protocol: "Hot air" for Russia?*, Department of Economics, University of Colorado, Working Paper 2000. No. 00-9, October. <https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/download/1743.pdf>
- Stokke OS. *Nuclear dumping in Arctic seas: Russian implementation of the London Convention*.1998.
- Stokke OS. *Subregional cooperation and the protection of the Arctic marine environment: the Barents Sea*. In *Protecting the Polar Marine Environment: Law and Policy for Pollution Prevention*, Cambridge : Cambridge Univ. Press 2000. <https://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511494635>
- Romanovskaya AA, Korotkov VN, Polumieva PD, Trunov AA, Vertyankina V.Yu., Karaban RT. *Greenhouse gas fluxes and mitigation potential for managed lands in the Russian Federation*. 2019 https://ideas.repec.org/a/spr/masfgc/v25y2020i4d10.1007_s11027-019-09885-2.html
- T. Jayaraman, "The Paris Agreement on Climate Change: Background, Analysis, and Implications", *Review of Agrarian Studies*, vol. 5, no. 2, July-December 2015, hal 55-57. <https://ideas.repec.org/a/fas/journal/v5y2015i2p42-59.html>
- Tynkkynen N. *Action frames of environmental organisations in post-Soviet St. Petersburg*. *Environ Politic*. 2006. <https://doi.org/10.1080/09644010600785275>
- Victor DG, Raustiala K, Skolnikoff EB, eds. *The Implementation and Effectiveness of International Environmental Commitments*. Cambridge, MA: MIT Press.1998. <https://mitpress.mit.edu/9780262720281/the-implementation-and-effectiveness-of-international-environmental-commitments/>

Victor D.G., N. Nakicenovic, and N. Victor. *The Kyoto Protocol Carbon Bubble: Implications for Russia, Ukraine, and Emission Trading*. IIASA Interim Report. 1998.

<https://core.ac.uk/download/pdf/33897028.pdf>

Whitefield S. *Russian mass attitudes toward the environment, 1993–2001*. *Post-Sov. Aff.* 2003.

<https://doi.org/10.2747/1060-586X.19.2.95>

SITUS WEB

AR6 *Climate Change. The physical science basis* 2021

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>

Bretherton, C., & Vogler, J. *The European union as a global actor*. London: Routledge. 2006.

Darst RG. *Smokestack Diplomacy: Cooperation and Conflict in East-West Environmental Politics*. Cambridge, MA: MIT Press. 2001.

Egenhofer, C. *What can the EU do to encourage Russia to ratify the Kyoto Protocol?* CEPS Commentary. 2007.

<https://www.euractiv.com/section/sustainable-dev/opinion/what-can-the-eu-do-to-encourage-russia-to-ratify-the-kyoto-protocol/>

Energy Inf. Adm. *Russia*. 2007, diakses pada mei 2022

<http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>

France 24. *Russian President Vladimir Putin Says Humans not Responsible for Climate Change*. 2017.

<https://www.france24.com/en/20170331-russian-president-vladimir-putin-says-humans-not-responsible-climate-change>

Golub, A., & Strukova, E. *Russia and the GHG market*. *Climatic Change*. 2004. hlm 224

Grubb, M. *Meeting report: The Moscow world conference on climate change*, Moscow, 30 Sept – 3 Oct 2003. *Climate Policy*. 2003. hlm 475.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/na-ruu-ratifikasi-paris-agreement.pdf> diakses pada 26 agustus 2021

https://unfccc.int/MA/Russian_Federation#eq-5 diakses pada 13 september 2021

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

Isi dari United Nations Framework Convention On Climate Change Diakses dari

<https://unfccc.int/resource/docs/covnp/conveng.pdf> pada 01 oktober 2021

Interfax.ru. *The Kremlin Announced its Intention to Comply with the Paris Climate Agreement*. 2017. <https://www.interfax.ru/russia/564790>

Janetschek, Hannah. “*The 2030 Agenda and the Paris Agreement: Voluntary Contributions towards Thematic Policy Coherence*”, *Climate Policy*. 2019. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1677549>

Johannes Friedrich, Mengpin Ge and Andrew Pickens, *World Resources Institute*: This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters 10 Desember 2020 diakses dalam <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>

- Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Hukum Online, *Perlukah UU Ratifikasi Diubah Jika Perjanjian Internasionalnya Berubah?* diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-uu-ratifikasi-diubah-jika-perjanjian-internasionalnya-berubah-lt5cad561c7c569>
- Kotov V, Nikitina E. *Implementation and effectiveness of the acid rain regime in Russia*. 1998.
- Kotov, V. *The EU-Russia ratification deal: The risks and advantages of an informal agreement*. International Review for Environmental Strategies. 2004.
- Laporan Inventaris Nasional, 2019, <https://unfccc.int/documents/194838>; draft Laporan Inventarisasi Nasional, 2020
- McLaughlin, D. *Way paved for Russia to join world trade pact*. Irish Times. 2004.
- Menlhk, "mengenai perubahan iklim" diakses pada mei 2022 <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/infoiklim/perubahan-iklim>
- Nationalgeographic, "resmi ketuk palu konferensi perubahan iklim dunia hasilkan Paris Agreement" <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/resmi-ketuk-palu-konferensi-perubahan-iklim-dunia-hasilkan-perjanjian-paris>
- Oldfield, J. D., Kouzmina, A., & Shaw, D. J. B. *Russia's involvement in the international environmental process*. A research report. Eurasian Geography and Economics. 2003.
- Peake, S. *Delivering the Kyoto baby*. Refocus. 2004 hlm 52.
- Report on climate features in territory of Russian Federation in 2018*. Moscow, 76 p.
- <http://www.meteorf.ru/upload/pdf/download/o-klimat-rf-2018.pdf>
- Rhany Chairunissa Rufinaldo. "Rusia Bergabung Dengan Paris Agreement Tentang Perubahan Iklim," Anadolu agency. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/rusia-bergabung-dengan-perjanjian-paris-tentang-perubahan-iklim/1592049> diakses 21 agustus 2021
- "Russia gives approval to paris climate accord" diakses pada 04 agustus 2022 <https://www.reuters.com/article/us-climate-change-russia-idUSKBN1W8162>
- Schiermeier, Q. *The long road from Kyoto*. 2003. hlm 13.
- Schiermeier, Q., & McWilliams, B. *Crunch time for Kyoto*. 2004. Hlm 13.
- The Paris Climate Agreement: Is it sufficient to limit climate change?* DIW, 15 February 2016 https://www.diw.de/de/diw_01.c.526893.de/publikationen/roundup/2016_0091/the_paris_climate_agreement_is_it_sufficient_to_limit_climate_change.html
- Tipton, J. E. *Why did Russia ratify the Kyoto Protocol? Why the wait?* An analysis of the environmental, economic, and political debates. Slovo. 2008.
- United Nations (UN), United Nations Framework Convention on Climate Change (United Nations Treaty Series, 1992), Annex 1
- United Nations (UN), United Nations Framework Convention on Climate Change, *Konsideran Alinea Ketiga*
- UNFCCC. *Submission by Germany on Behalf of the European Community, its Member States, and Croatia, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic and Slovenia on Emission Trading*. 1999.

- UNFCCC. *Second National Communication of the Russian Federation to the Secretariat of UNFCCC*. 1998.
- Wang, H. *Warm welcome Russia ratifies Kyoto*. Harvard International Review. 2005. hlm 13.